

**Peran *Female Peacekeepers* Indonesia dalam Misi Perdamaian
United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL)
Tahun 2015-2017**

Khoirunnisa, Afa Dilla Adeliya
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
khoirunnisa@uta45jakarta.ac.id

Abstract

Every country certainly interacts with other countries. This interaction can take the form of cooperation (peace) or conflict. Conflicts that occur are more complex because of threats that not only come from inter-state actors but intra-state and conflicts that occur in the border regions of the country. The UN through the Peacekeeping Mission has carried out various peace operations in conflicting countries and has involved the participation of women peacekeepers based on the resolution of the UN Security Council number 1325 of 2000. One of the countries contributing to peace operations through its peacekeeping force is Indonesia. Indonesia is noted to have contributed to the peace operation through a force called the Garuda Contingent. This force was formed with the aim of being a peacekeeping force in a conflict country. Until now, Indonesia is still committed to maintaining peace by increasing active participation in peace operations, especially in conflict countries. Indonesia does not only send soldiers who are male but also women. For Indonesia, sending female peacekeepers is part of the national defense strategy. This was based on the existence of UNSC Resolution 1325 of 2000 which emphasized the important role of women in security for conflict prevention or resolution, peace building, peace keeping, rehabilitation and reconstruction. But it is unfortunate that the number of troops between women and men is still very far apart. From this it can be seen that women are considered to lack the right to be in the public sphere, especially in the field of state and defense. This view has become a patriarchal culture inherent in Indonesian society so that women are still considered marginal. Yet to support gender mainstreaming in peacekeeping missions, each contributing country should continue to strive to increase the participation of female peacekeepers in positions that reach the community. Gender Equality and Peace Keeping Operations concepts used to discuss in this paper

Keywords: *Female Peacekeepers, Gender Equality, UNIFIL.*

Abstrak

Interaksi antar negara dalam hubungan internasional bisa berwujud dalam suatu Kerjasama, konflik maupun bersifat kompetisi. Kerjasama yang dilakukan antar negara juga dapat berupa upaya dalam menciptakan upaya perdamaian seperti PBB melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian telah melakukan berbagai operasi

perdamaian di negara-negara berkonflik dan telah melibatkan partisipasi pasukan perempuan (female peacekeepers) yang didasari oleh resolusi DK PBB nomor 1325 tahun 2000 yang juga merupakan strategi pertahanan negara. Salah satu negara yang berkontribusi dalam operasi perdamaian melalui pasukan perdamaannya adalah Indonesia melalui pasukan yang bernama Kontingen Garuda yang bertujuan sebagai pasukan perdamaian di negara konflik. Pengiriman pasukan tersebut tidak terbatas pada pengiriman tentara berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan (female peacekeepers) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai, penjagaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun sayangnya bahwa jumlah pasukan antara perempuan dengan laki-laki masih sangat jauh selisihnya, hanya berjumlah 2 orang female peacekeepers Indonesia dari 850 orang jumlah pasukan karena perempuan dianggap kurang memiliki hak untuk berada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan. Ditambah lagi female peacekeepers Indonesia ini masih dibatasi perannya dengan adanya persyaratan bahwa tentara wanita harus memiliki tugas yang bersifat non-tempur. Hal ini dikarenakan pertempuran bukanlah sebuah kodrat dari perempuan. Sampai saat ini, jumlah perbandingan female peacekeepers Indonesia dengan laki-lakinya yakni hanya menduduki 4% untuk wanita dan 96% untuk laki-laki.

Pandangan ini merupakan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. Penulis akan menggunakan kerangka konsep Gender Equality dan Peace Keeping Operation untuk membahas masalah tersebut dalam paper ini.

Kata Kunci: *Penjaga Perdamaian Wanita, Kesetaraan Gender, UNIFIL.*

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dingin berakhir, hampir setiap negara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang antar negara. Namun dewasa ini, konflik yang terjadi lebih kompleks karena ancaman yang tidak hanya datang dari aktor antar-negara melainkan intra-negara dan konflik yang terjadi di wilayah perbatasan negara. Oleh karenanya, pentingnya kontribusi dari aktor-aktor non-negara yang berperan dalam menjaga perdamaian termasuk pasukan perdamaian yang berada dibawah Dewan Keamanan PBB melalui Peacekeeping Operations (PKO) atau Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) telah melakukan berbagai operasi perdamaian di negara-negara berkonflik dan telah melibatkan partisipasi pasukan perempuan (female peacekeepers) yang didasari adanya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tahun 2000.

Pertama kali Kontingen Garuda (Konga) yang dilakukan di Mesir pada tahun 1957 yang tergabung atas misi United Nations Emergency Force (UNEF). Hingga saat ini Indonesia masih terus berkomitmen melakukan pemeliharaan perdamaian dengan cara meningkatkan partisipasi aktif dalam operasi perdamaian khususnya di negara-negara konflik (CNN Indonesia, 2018). Agenda Misi Pemeliharaan Perdamaian ini tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Pembukaan UUD 1945).

Salah satu negara tujuan operasi perdamaian dari Kontingen Garuda Indonesia adalah Lebanon. Kontingen Garuda merupakan kontingen terbesar dalam misi perdamaian PBB di Lebanon atau biasa disebut United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Hal ini dikarenakan Kontingen Garuda telah dipercaya dapat membantu menjaga perdamaian di Lebanon bahkan Konga atau bisa disebut juga Indonesian Battalyon (Indobatt) telah menjadi pasukan andalan bagi pemerintah maupun masyarakat di Lebanon (Anggaraman Saragih, 2018).

Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di bagian Timur tengah, sepanjang laut tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Negara ini memiliki sejarah penting karena konflik besar yang terjadi antara pasukan Hizbullah dari Lebanon dan juga Israel Defence Force (IDF) dari Israel. Hizbullah adalah organisasi Syiah yang didirikan selama perang saudara Lebanon sebagai penggabungan beberapa kelompok yang berjuang melawan pendudukan Israel pada 1982 di Lebanon, sedangkan IDF merupakan angkatan pertahanan dari Israel (McCormack, 2006).

Setelah berakhirnya perang antara Lebanon dengan Israel pada tahun 2006, Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian melalui Kontingen Garuda ke Lebanon. Pemerintah Indonesia mengirim Kontingen Garuda untuk pertama kali ke Lebanon melalui pro-kontra. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat mendorong pemerintah untuk mengirim Kontingen Garuda ke Lebanon, sedangkan terdapat segelintir masyarakat yang tidak setuju (kontra) dengan pengiriman pasukan ini. Hal ini dikarenakan Lebanon merupakan salah

satu negara di Timur Tengah yang jumlah penduduknya hampir kebanyakan Muslim, ditambah lagi Lebanon sedang bersitegang dengan Israel yang mayoritas penduduknya ialah Yahudi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai Peran *Female Peacekeepers* Indonesia dalam Misi Perdamaian *United Nations Interim Force In Lebanon* (UNIFIL) pada Tahun 2015-2017.

KERANGKA KONSEP

1. KONSEP KESETARAAN GENDER (*GENDER EQUALITY*)

Secara mendasar, konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Handayani dan Sugiarti (2008) mengungkapkan bahwa jenis kelamin (seks) adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Lebih lanjut Handayani menjelaskan, seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis, alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat).

Menurut Qoriah (2008) bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang amat Panjang dan dianggap sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah lagi. Perbedaan ini akan menimbulkan pembagian kerja yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pembagian kerja gender yang tercermin pada 3 peran gender yaitu reproduktif (melahirkan dan mempersiapkan keperluan keluarga), produktif (adalah kegiatan yang menghasilkan produksi barang atau jasa, untuk dikonsumsi sendiri atau dijual), sedangkan peran sosial adalah yang mencakup kegiatan sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah :

- a. Akses:** Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.
- b. Partisipasi:** Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

- c. **Kontrol:** perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
- d. **Manfaat:** pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Partisipasi dan Representasi Gender

Perempuan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam merancang dan mengelola proyek pembangunan lokal, inisiatif pemeliharaan perdamaian, rekonsiliasi formal, dan struktur pemerintahan lokal selain menargetkan partisipasi perempuan dalam inisiatif dan struktur yang terlihat secara politik seperti negosiasi, perjanjian perdamaian, operasi pemeliharaan perdamaian, struktur kekuasaan yang dibentuk selama periode transisi pasca-konflik, lembaga negara untuk pemerintahan konstitusional dan demokratis, dll. Untuk melakukannya, langkah-langkah berikut harus diambil :

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proyek pembangunan lokal;
2. Meningkatkan peningkatan kapasitas kelompok perempuan di desa (literasi, struktur organisasi, keterampilan manajemen);
3. Merancang program pelatihan yang bertujuan membangun kepemimpinan perempuan, terutama di komunitas pedesaan;
4. Mengembangkan kerangka politik yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan lokal, terutama dengan membuat masyarakat umum dan aktor lokal peka terhadap peran perempuan dalam perdamaian, pembangunan dan rekonsiliasi nasional.

2. KONSEP PEACE KEEPING OPERATION (PKO)

Pendekatan yang dikemukakan oleh Johan Galtung yaitu *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* adalah mekanisme perdamaian dimana adanya keseimbangan kekuasaan atau *balance of power* dan mengendalikan pihak yang bertikai untuk tidak

melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan *peacemaking* yaitu upaya menciptakan perdamaian melalui dialog dan negosiasi antara pihak yang terlibat. Konsep *peacebuilding* adalah mekanisme perdamaian yang bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan penyebab perang dan menawarkan alternatif untuk perang dalam situasi di mana perang mungkin terjadi. *Peacebuilding* ini merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab dari konflik (Galtung, 1976 : 282).

Sementara Solà-martín & Woodhouse (2019) berpendapat bahwa pasukan perdamaian memiliki tugas yang lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terdapat beberapa dimensi yang dilakukan oleh pasukan perdamaian yakni dimensi militer yang meliputi mengawasi dan mengamati gencatan senjata, menjaga zona pemisahan, menarik pihak belligerent, memeriksa posisi pasukan, mencegah infiltrasi pasukan, mencegah terjadinya konflik sipil, mengawasi perjanjian keamanan, mengamati penempatan pasukan, membersihkan ladang ranjau, dan melatih serta reformasi unit militer.

Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Ghali pada Juli 1992 menggambarkan empat model operasi perdamaian yang kemudian membantu dalam mendefinisikan operasi perdamaian (*peacekeeping operations*), yaitu: (Jett, 2001 : 14)

1. *Preventive Diplomacy* : aksi untuk mencegah perselisihan meningkat diantara kelompok-kelompok bertikai, untuk mencegah perselisihan menjadi konflik, dan untuk mencegah konflik semakin meluas apabila memang terjadi.
2. *Peacemaking* : aksi untuk membawa kelompok yang bertikai menuju sebuah perundingan sebagaimana yang tertuang dalam Chapter VI piagam PBB.
3. *Peacekeeping* : menyebarkan para *peacekeeper* PBB ke lapangan dengan izin dari kedua kelompok bertikai yang terdiri dari militer, personel polisi, dan terkadang kelompok sipil.

4. *Peacebuilding* : aksi untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang dapat memperkuat dan mempererat perdamaian untuk menghindari konflik muncul kembali.

Adapun tugas-tugas yang secara umum dijalankan oleh PKO antara lain : (Rachmat, 2015 : 138)

1. Pemeliharaan kondisi gencatan senjata dan memisahkan pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan waktu bagi kedua pihak untuk saling menciptakan sebuah kondisi kondusif bagi berlangsungnya negosiasi oleh pihak-pihak yang berkonflik.
2. Melakukan pencegahan terhadap perluasan konflik yang terjadi, sehingga konflik yang telah terjadi tidak bereskalasi kembali.
3. Menyediakan perlindungan terhadap kemanusiaan, karena dalam banyak konflik korban yang paling banyak adalah penduduk sipil yang senantiasa dijadikan target untuk mencapai tujuan politik bagi pihak-pihak yang berkonflik. Untuk tugas ini pasukan penjaga perdamaian diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap operasi kemanusiaan baik yang dijalankan oleh PBB maupun oleh organisasi internasional lainnya.
4. Melakukan upaya penyelesaian konflik secara damai dan komprehensif. Dimana operasi yang dijalankan biasanya bersifat multidimensi dimana dalam pelaksanaannya dapat membantu beragam tugas seperti memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan HAM, memantau pelaksanaan pemilihan umum dan melakukan koordinasi untuk melakukan rekonstruksi pasca konflik tersebut.

Peran khusus juga dilakukan untuk berkomunikasi dengan perempuan dan anak-anak dengan tujuan memfasilitasi interaksi dengan perempuan dalam budaya yang melarang interaksi lintas gender, menjadi panutan dan simbol pemberdayaan bagi perempuan atau anak perempuan di zona perang, membantu mengatasi kebutuhan perempuan seperti

mantan kombatan yang berpengalaman kekerasan seksual atau trauma lain di zona konflik, membantu mengurangi konflik, dan memberikan perasaan yang lebih besar tentang keamanan dan kenormalan bagi populasi sipil, terutama perempuan dan anak-anak (Bigio & Vogelstein, 2016 : 137).

METODOLOGI PENULISAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Model deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan, memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Moloeng, 2013 : 25).

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2012 : 183) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Sedangkan menurut Patton, Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengaturan urutan data, mengelompokkannya ke dalam sebuah pola, kategori, satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran (Moloeng, 2013 : 103). Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen, atau arsip.

PEMBAHASAN

UN Female peacekeepers

Female peacekeepers adalah wanita-wanita dengan berbagai peran dan tugasnya yang sangat penting, yang tergabung di dalam misi perdamaian PBB. Sebagai penjaga perdamaian, mewakili PBB berada pada suatu negara untuk

membantu mengembalikan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma akibat pertikaian (TNI AU, 2014).

Gambar 4.1. UN Female peacekeepers dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB



(Sumber: "Women in peacekeeping"

<http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>,
2020)

Dalam gambar 4.1 terlihat bagaimana beberapa peranan dari UN *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian. PBB telah meminta lebih banyak peran *female peacekeepers* untuk memperkuat pendekatan "holistik" secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini. Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak *female peacekeepers* ke dalam misi-misi PBB. Lebih banyak *female peacekeepers* yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.

Female peacekeepers bertindak sebagai role models pada lingkungan setempat, menginspirasi wanita dan anak perempuan dalam masyarakat yang sering didominasi pria untuk mendorong hak-haknya dan partisipasi dalam proses perdamaian. Adapun tujuan dari peningkatan rekrutmen wanita sebagai UN *peacekeepers* dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB amatlah penting yakni untuk : (Hutabarat, 2017 : 72).

- Memberdayakan para wanita di *host community*;

- Menangani kebutuhan-kebutuhan khusus dari *female ex-combatants* selama proses demobilisasi dan integrasi kembali ke dalam kehidupan sipil;
- Membantu agar *peacekeeping force* dapat dijangkau oleh wanita dalam komunitas;
- Melakukan wawancara kepada *survivors of gender-based violence*;
- Mentoring taruna wanita pada akademi militer dan kepolisian;
- Melakukan interaksi dengan wanita dalam masyarakat dimana wanita dilarang berkomunikasi dengan pria.

Selain berbagai hal di atas, kehadiran *female peacekeepers* dapat juga untuk : (UN Peacekeeping, 2019)

- Membantu mengurangi konflik dan konfrontasi; keanekaragaman dalam pemeliharaan perdamaian membantu untuk mengatasi dampak negatif yang tidak proporsional terhadap konflik terhadap kehidupan perempuan dan membawa perspektif dan solusi baru ke meja dengan secara efektif menangani kebutuhan perempuan dalam situasi konflik dan pasca konflik, termasuk para mantan gerilyawan wanita dan tentara anak-anak selama proses demobilisasi dan reintegrasi ke dalam kehidupan sipil.
- Meningkatkan akses dan dukungan bagi wanita setempat; penjaga perdamaian wanita dapat mengakses populasi dengan lebih baik, termasuk wanita dan anak-anak misalnya, dengan mewawancarai dan mendukung mereka yang selamat dari kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak-anak dengan demikian menghasilkan informasi penting yang sulit dijangkau.
- Menjadi *role models* bagi wanita dalam masyarakat; para penjaga perdamaian perempuan bertindak sebagai mentor dan panutan yang kuat bagi perempuan dan anak perempuan dalam lingkungan pasca-konflik di komunitas tuan rumah, memberikan contoh bagi mereka

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon setelah konflik yang terjadi di Lebanon tahun 2006. Pasukan perdamaian yang dikirimkan oleh Indonesia ke Lebanon disebut dengan Kontingen Garuda UNIFIL yang beranggotakan TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kontingen Garuda juga mengirimkan pasukan perempuan yang disebut dengan *Female peacekeepers* Indonesia, pertama kali *Female peacekeepers* Indonesia telah dikirimkan ke daerah konflik Kongo pada tahun 2008, selanjutnya mereka juga dikirimkan ke Lebanon.

Peran yang dilakukan oleh Kontingen Garuda di Lebanon didasari oleh satuan gagasan (satgas), satgas yang dimiliki oleh Kontingen Garuda adalah *Indobatt, Civil-Military Cooperations, Force Head Quarter Support Unit, Maritime Task, Military Police Unit, Force Protection Company, Military Community Outreach Unit* dan medis. Peran *female peacekeepers* untuk di Lebanon lebih dibutuhkan di bagian medis, administrasi dan logistik, hal ini dikarenakan *female peacekeepers* Indonesia masih menjadi pendukung dari Kontingen Garuda. Pada kenyataannya *female peacekeepers* bisa melakukan patroli bersama tentara laki-laki lainnya namun tetap mereka hanya bisa melakukan patroli di siang hari (Firohmatillah & Sudirman, 2019 : 143).

Indonesia melalui koordinasi Kementerian dan Lembaga (termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar TNI) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) upayanya berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi pengerahan pasukan pemelihara perdamaian dunia, termasuk dalam hal *female peacekeepers* di Lebanon Selatan.

Namun sangat disayangkan bahwa jumlah pasukan antara perempuan dengan laki-laki masih sangat jauh selisihnya. Pada 2008, yang merupakan tahun pertama pemberangkatannya yang hanya berjumlah 2 orang *female peacekeepers* Indonesia dari 850 orang jumlah pasukan. Dari hal tersebut terlihat bahwa perempuan dianggap kurang memiliki hak untuk berada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan. Pandangan ini telah menjadi budaya

patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. Ditambah lagi *female peacekeepers* Indonesia ini masih dibatasi perannya dengan adanya persyaratan bahwa tentara wanita harus memiliki tugas yang bersifat non-tempur. Hal ini dikarenakan pertempuran bukanlah sebuah kodrat dari perempuan. Tugas anggota *female peacekeepers* Indonesia ini berada di bidang non-tempur yaitu melaksanakan urusan administrasi, mendukung perwira tinggi dalam pertemuan dan protokol, mengajar bahasa asing dan menjaga kesejahteraan dan kondisi sosial institusi militer. Tujuan *female peacekeepers* Indonesia yaitu memberikan hak, kewajiban dan kehormatan kepada perempuan di Indonesia serta mengabdikan diri ke bidang militer. Sampai saat ini, jumlah perbandingan *female peacekeepers* Indonesia dengan laki-lakinya yakni hanya menduduki 4% untuk wanita dan 96% untuk laki-laki (Korps Wanita Angkatan Laut, 2017).

United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL)

Gambar 4.3. Logo UNIFIL



(Sumber: UNIFIL, 2017)

UNIFIL dibentuk sebagai tindak lanjut dewan keamanan PBB atas protes keras Lebanon terhadap serangan Israel ke kawasan Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel. Permintaan Lebanon berkaitan dengan konflik yang terjadi di kawasan Selatan Lebanon sejak Maret 1978.

Sebagaimana didefinisikan oleh Resolusi DK PBB No. 1701 Tahun 2006, *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* melakukan serangkaian operasi di seluruh wilayah operasi antara sungai Litani di utara dan Garis Biru (Garis Penarikan Pertahanan Israel) di wilayah Lebanon Selatan (United Nations Peacekeeping, "*Where We Operate*", 2017). Tujuan utamanya adalah membantu

Pemerintah Lebanon agar perbatasannya dan titik masuk lainnya yang akan memicu datangnya serangan dari kelompok bersenjata Israel.

Gambar 4.4. Peta Wilayah Operasi Misi UNIFIL



(Sumber: UNIFIL UN Missions, 2019)

Cakupan wilayah operasi tersebut sebagaimana tertuang dalam mandat pelaksanaan misi UNIFIL.

“The Line of Withdrawal – also called the “Blue Line” – was identified in 2000 by the United Nations in cooperation with Lebanese and Israeli officials for the purpose of confirming the withdrawal of Israel Defence Forces (IDF) troops from Lebanese territory in conformity with Security Council resolution 425. The Blue Line is not the border between Lebanon and Israel.” (UNIFIL UN Missions, 2019)

Artinya bahwa “Garis Biru” adalah istilah untuk garis penarikan yang diidentifikasi pada tahun 2000 oleh PBB yang bekerja sama dengan pejabat Lebanon dan Israel untuk tujuan mengkonfirmasi penarikan pasukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari wilayah Lebanon sesuai dengan Resolusi DK PBB no. 425. Garis Biru bukanlah perbatasan antara Lebanon dan Israel, melainkan istilah untuk garis penarikan antar kedua negara tersebut.

UNIFIL beroperasi dalam mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keamanan di daerah tersebut. Setelah perang 2006, Pemerintah Lebanon memutuskan untuk mengerahkan 15.000 pasukan LAF di Lebanon Selatan, termasuk di wilayah operasi UNIFIL. Pada saat yang sama, Dewan Keamanan PBB mengizinkan peningkatan kekuatan pasukan UNIFIL menjadi maksimal 15.000 tentara. Selain memiliki tanggung jawab untuk memantau penghentian permusuhan, UNIFIL diamanatkan untuk, antara lain, mendampingi dan mendukung *Lebanese Armed Force* (LAF) ketika mereka dikerahkan di seluruh wilayah Lebanon Selatan.

DASAR KEBIJAKAN KEIKUTSERTAAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB

1. *Pembukaan UUD'45 (Alinea ke-4)*

Peran serta Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia dalam membangun stabilitas dan perdamaian dunia diwujudkan melalui pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB ke sejumlah negara di berbagai kawasan yang dilanda konflik (Kemhan, 2018 : 67).

2. *Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*

Dari penugasan pasukan Kontingen Garuda, Indonesia mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian telah mengangkat posisi Indonesia dalam lingkup hubungan antar bangsa, terutama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif (Kemhan, 2008 : 154).

3. *Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000*

Munculnya peran *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB diperkuat sejak dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 1325

Tahun 2000. Resolusi tersebut menandakan bahwa isu gender telah menjadi fokus perhatian dalam agenda perdamaian dan keamanan dunia (United Nations, 2002 : 2). Kehadirannya mengajak seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dimana fokus utamanya adalah partisipasi, proteksi, bantuan dan pemulihan. Di dalamnya juga menyinggung tentang partisipasi perempuan pada level negara seperti polisi, kepemimpinan politik, rekrutmen *military officers* dan prajurit (Ghimire, 2017 : 213).

Sejak disahkannya mandat tersebut maka pelaksanaan PKO mulai mengacu pada proses pengintegrasian gender dan mempertimbangkan aspek penilaian serta impikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan termasuk dalam setiap mandat pelaksanaan dan kebijakan atau bahkan program di semua bidang dari PKO, serta mengupayakan tercapainya tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Atas resolusi tersebut Dewan Keamanan PBB secara serentak meminta seluruh negara anggotanya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam misi *Peacekeeping Operation* (Landmark Resolution on *Women, Peace and Security, 2000*). Hal tersebut tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1325 tahun 2000 yang berbunyi :

“Urges Member of States to ensure increased representation of women at all decision making levels in national, regional and international institutions and mechanism for the prevention, management, and resolution of conflict” (Resolution 1325, 2000)

Resolusi tersebut mendesak negara-negara anggota untuk memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat pengambilan keputusan di lembaga nasional, regional dan internasional serta pada mekanisme pencegahan, manajemen, dan penyelesaian konflik.

KONDISI KEBUTUHAN FEMALE PEACEKEEPERS DI LEBANON

Lebanon bukanlah daerah di mana perdamaian dapat dengan mudah tercipta. Meskipun area ini sudah dijaga dan diamati oleh pasukan perdamaian,

konflik kecil sering terjadi di daerah *Blue Line* yang juga sering menyebabkan adanya korban yakni pihak pengamat militer (*peacekeepers*) PBB. Serangkain konflik bersenjata yang terus memanas antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina di Lebanon yang menyebabkan situasi yang buruk dan menimbulkan korban perang yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Dalam operasi perdamaian di Lebanon, peran perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan di dalamnya. Perempuan memiliki tugas yang lebih cenderung kepada masyarakat perempuan sebagai korban akibat perang, hal ini dikarenakan mereka dianggap lebih peka terhadap kejahatan seksual dan ketidakadilan dalam perang. Dan kebutuhan para korban perempuan dan anak-anak khususnya, dalam memperbaiki dan memulihkan mental mereka.

Disamping itu kondisi di Lebanon, masih terdapat budaya yang mengharuskan perempuan yang berbicara dengan sesama perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga *female peacekeepers* memiliki peran yang signifikan dan dipercaya dalam memulihkan luka psikis yang diakibatkan perang. Sementara *peacekeepers* laki-laki penugasannya lebih luas dibandingkan perempuan seperti patroli, menjaga perbatasan, melindungi daerah yang rawan akan ranjau darat dan lain sebagainya. Namun hal ini bukan berarti menjadi sebuah halangan bagi *female peacekeepers* dalam menjalankan penugasannya. Mereka telah dipercaya dalam bidang kemanusiaan, berinteraksi dengan warga sesama perempuan dan anak-anak yang terkena dampak perang dan berupaya dalam menghilangkan rasa trauma bagi masyarakat Lebanon. Untuk itu maka diperlukannya peran wanita di dalam operasi perdamaian (The Guardian, 2016).

Kesetaraan gender dalam hal ini bukan digolongkan pada hal-hal yang berkenaan dengan teknis semata, namun lebih pada membuka peluang partisipasi kaum perempuan dalam bidang apapun termasuk bidang militer tepatnya pada misi perdamaian dalam bentuk *female peacekeepers*. Juga terlihat dari peningkatan jumlah personel yang dikirim dalam misi tersebut, sekalipun secara persentase memang masih kecil dibandingkan jumlah personel laki-laki, namun keberadaan *female peacekeepers* tetap dibutuhkan sekaligus memberi peluang bagi kaum perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam misi perdamaian

PBB. Peran pasukan perempuan semakin diakui keberadaannya sejak resolusi DK PBB No. 1325 Tahun 2000 mengenai pentingnya perempuan dalam pencegahan ataupun resolusi konflik, *peacebuilding*, *peacekeeping*, rehabilitasi dan rekonstruksi.

PERAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIN UNIFIL TAHUN 2015-2017

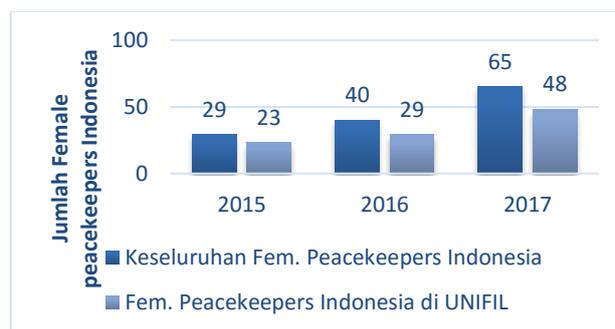
1. *Meningkatkan representasi perempuan di semua level pembuatan keputusan di tingkat nasional, regional, dan mekanisme serta institusi internasional untuk pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik*

Peran female peacekeepers semakin diakui keberadaannya sejak DK PBB Nomor 1325 tahun 2000 mengenai pentingnya perempuan dalam pencegahan ataupun resolusi konflik, *peacebuilding*, *peacekeeping*, rehabilitasi dan rekonstruksi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon setelah konflik yang terjadi di Lebanon tahun 2006. Pasukan perdamaian yang dikirimkan oleh Indonesia ke Lebanon disebut dengan Kontingen Garuda UNIFIL yang beranggotakan TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kontingen Garuda juga mengirimkan pasukan perempuan yang disebut dengan Female peacekeepers Indonesia.

2. *Mengangkat lebih banyak perempuan sebagai representasi khusus PBB*

Pada misi UNIFIL 2015-2017, diperoleh total 100 *female peacekeepers* Indonesia yang diberangkatkan ke Lebanon dengan grafik di bawah ini :

Gambar 4.8. Perbandingan Jumlah *Female peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan dengan yang berada di UNIFIL (2015-2017)



(Sumber: Astried, Sumertha, Saragih, 2018 : 55)

Melalui grafik tersebut, dapat dilihat terjadi peningkatan secara bertahap terkait jumlah *female peacekeepers* yang diberangkatkan ke misi perdamaian UNIFIL. Jika dibandingkan dengan jumlah *female peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan, grafik tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih dari 50% *female peacekeepers* ditugaskan di UNIFIL.

Partisipasi *female peacekeepers* dalam hal implementasi dapat dilihat melalui posisi penugasan dan keterlibatannya dalam kegiatan. Posisi penugasan ini secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok penempatan tugas yaitu: prajurit kontingen (*formed units or contingents*), *military observer* dan *military staff* (UN *Peacekeeping*, 2006 : 2-3). Di UNIFIL sendiri, posisi yang ditempati oleh *female peacekeepers* Indonesia berada pada kontingen dan *military staff*. Khusus untuk *military observer*, terlepas dari vakumnya Indonesia mengirimkan *military observer* tahun 2011-2017, absennya *military observer* di UNIFIL disebabkan tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel sebagai pihak yang terlibat konflik.

3. **Memperluas peran dan kontribusi perempuan di operasi lapangan PBB, khususnya pengamat militer (*military observer*), polisi sipil, serta personel HAM dan kemanusiaan**

Peran perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan di dalamnya. Perempuan memiliki tugas yang lebih cenderung kepada masyarakat perempuan hal ini dikarenakan mereka dianggap lebih peka terhadap kejahatan seksual dan ketidakadilan dalam perang. Namun hal ini bukan berarti menjadi sebuah halangan bagi *female peacekeepers* Indonesia dalam

menjalankan penugasannya, mereka telah dipercaya dalam bidang kemanusiaan, berinteraksi dengan warga sesama perempuan dan anak-anak yang terkena dampak perang dan berupaya dalam menghilangkan rasa trauma bagi masyarakat Lebanon.

4. *Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi pemeliharaan perdamaian*

Peningkatan anggota *female peacekeepers* ke dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian. Bentuk komunikasi juga sangat penting bagi berjalannya pasukan Kontingen dari berbagai negara yang masuk kedalam suatu negara konflik, diharapkan akan menghasilkan bentuk kepercayaan untuk melindungi dan menjaga stabilitas keamanan di Lebanon. Ketika kepercayaan dan komunikasi sudah berjalan dengan lancar diharapkan membangun Kembali/merekonstruksi atau *recovery* fasilitas rumah, sekolah, dan sarana pendidikan lainnya sehingga masyarakat lokal dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Hubungan Sipil Militer ini merupakan salah satu bentuk *recovery* atau pemulihan, dimana konflik yang terjadi telah menghancurkan segala sesuatu yang ada di Lebanon termasuk pembangunan hingga rasa trauma yang hadir dalam benak masyarakat lokal di Lebanon.

5. *Menyediakan garis haluan dan materi untuk pelatihan tentang perlindungan, hak, dan kebutuhan khusus perempuan termasuk melibatkan perempuan di semua tolak ukur pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) & pembinaan perdamaian (peacebuilding)*

Female peacekeepers Indonesia lebih berperan dalam masalah kesehatan dan menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan misalnya pengetahuan mengenai kesehatan masyarakat, memberikan penyuluhan mengenai pendidikan hubungan antara Indonesia dan Lebanon, menjadi panutan bagi masyarakat perempuan di Lebanon dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada disana sehingga berdampak bagi Kesehatan masyarakat local di Lebanon (Hasil wawancara dengan Letkol. Sus. Ratih Pusparini, 21 Juli 2020, 11.00 WIB).

Melalui kegiatan CIMIC ini telah memperlancar komunikasi antara Kontingen Garuda di Lebanon dengan penduduk lokal sehingga dapat mendekatkan diri, menenangkan hati dan pikiran sehingga dapat terdengar berbagai keluhan mereka. (Hasil wawancara dengan Letkol. Sus. Ratih Pusparini, 21 Juli 2020, 11.00 WIB).

6. *Meningkatkan dukungan sukarela finansial, teknis, dan logistik untuk upaya-upaya pelatihan sensitif-gender*

Kegiatan CIMIC dalam misi UNIFIL berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mendukung otoritas lokal dengan memperkuat hubungan antara UNIFIL dengan komunitas local bertujuan untuk perbaikan jalan, penyediaan jasa medis, dokter gigi atau dokter hewan, berbagai kursus pendidikan, peningkatan kapasitas (*capacity building*) seperti menjahit, bahasa, komputer maupun pelajaran tentang pertolongan pertama. Program ini menjadi salah satu kontribusi nyata para pemelihara perdamaian (“*UN Military Roles and Responsibilities*, 2006 : 2-3).

Pada Agustus 2016 terbentuk juga tim khusus *female peacekeepers* baik yang berseragam maupun sipil untuk memastikan perspektif gender hadir dalam berbagai interaksi batalion dengan perempuan di dalam komunitas Lebanon Selatan. Tim khusus ini adalah *Female Assessment/Analysis and Support Team* (FAST), yang terbentuk dengan 21 *peacekeepers* militer dan sipil lintas wilayah operasi UNIFIL. Setiap anggota tim ini dilatih dan dipanggil dari Kontingen UNIFIL untuk memberikan kehadiran perempuan dalam berbagai situasi yang sensitif akan budaya.

7. *Para aktor yang terlibat dalam negosiasi dan pengimplementasian perjanjian perdamaian dalam mengadopsi perspektif gender*

Peristiwa bersejarah dalam UN *peacekeeping* terjadi pada tanggal 12 May 2014, pada saat Mayor Jenderal Kristin Lund dari Norwegia sebagai wanita pertama ditunjuk menjadi UN Force Commander in a United Nations peacekeeping operation— UN Peacekeeping Force di Cyprus. Mayjen Lund memiliki prestasi dalam 34 tahun karier militernya pada tingkat nasional dan internasional. Tahun 1991, bertugas dalam Operation Desert Storm to Saudi

Arabia, dan kemudian di Afghanistan pada North Atlantic Treaty Organization's International Security Assistance Force Headquarters. Tahun 2009, dipromosikan sebagai Mayor Jenderal dan Chief of Staff of the Norwegian Home Guard— perwira wanita pertama dipromosikan pada posisi tersebut. Pengalamannya di PBB termasuk bertugas di UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan *UN Protection Force in the Former Yugoslavia*. Penunjukkan Mayjen Lund adalah pengakuan pertama dari implementasi Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 mengenai “*women, peace and security*” (“Landmark resolution on Women, Peace and Security”, 2020). Resolusi tersebut merupakan pergeseran dalam kebijakan PBB untuk melibatkan wanita lebih banyak dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB di dunia. Hal ini juga menunjukkan afirmasi terhadap peranan wanita dalam pencegahan dan resolusi konflik, negosiasi, pemeliharaan perdamaian, respons kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Hal tersebut juga memerlukan integrasi perspektif gender dalam berbagai area tersebut, termasuk operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.

DINAMIKA DAN TANTANGAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA

Dalam perkembangannya, Indonesia turut memperhatikan target gender yang ditentukan oleh PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian yaitu 15% untuk perempuan militer (*military observer* dan *military staff*) dan 20% untuk perempuan polisi. Hal ini menarik dimana PBB meletakkan target 15% *female peacekeepers* dalam komponen militer namun setiap negara kontributor, termasuk Indonesia, memiliki keunikan hambatan dan tantangan tersendiri yang menyebabkan keterbatasan partisipasi perempuan (Hutabarat, 2017 : 81).

Lebih dari itu, partisipasi perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi pendukung saja seperti administrasi. Padahal untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian, setiap negara kontributor sudah seharusnya terus berupaya meningkatkan partisipasi *female peacekeepers* dalam posisi yang menjangkau masyarakat. Indonesia sendiri

melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) memiliki peran masing-masing baik secara strategis maupun operasional untuk meningkatkan partisipasi *female peacekeepers* Indonesia.

Partisipasi Indonesia dalam mengirimkan *female peacekeepers* sesuai dengan konsep kesetaraan gender bahwa negara mengadopsi strategi topdown dalam menghadapi keterbatasan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konsepnya, untuk memperbaiki posisi perempuan diperlukan elaborasi prinsip-prinsip dan standar transnasional. Untuk itu, Indonesia mengambil Resolusi No. 1325 sebagai landasan terhadap urgensi pengiriman *female peacekeepers* dimana secara kuantitas Indonesia menyumbang 6-10% *female peacekeepers* di dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017.

Dalam perspektif gender, partisipasi perempuan dalam ranah militer merupakan hal esensial. Secara empiris bahwa keterwakilan perempuan Indonesia dalam militer tidak lebih dari 4% menandakan mis-representasi perempuan dalam institusi. Hal ini memiliki konsekuensi logis terhadap proses pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan yang cenderung bersifat male-dominated. Kurangnya representasi perempuan dalam ranah militer ini juga setidaknya menyebabkan individu di dalam institusi militer tidak terbiasa memiliki personel perempuan dengan keunikannya. Padahal kontribusi perempuan dalam militer dan wilayah konflik sangat dibutuhkan kaitannya dengan penanganan korban berbasis gender, perempuan mantan kombatan, pendekatan terhadap masyarakat lokal, dan membuka akses bagi perempuan maupun anak-anak. Seperti yang disebutkan dalam tulisan Heywood bahwa perempuan dapat membentuk politik dunia termasuk dalam konsep keamanan dan perdamaian.

Adapun tahun 2015 dipilih sebagai titik awal mengingat terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019. Ini menjadi titik awal dalam melihat tren pengiriman *female peacekeepers* Indonesia dalam mendukung visi 4.000 personel tersebut. Sedangkan tahun 2017 dipilih sebagai titik akhir periode penelitian memperhatikan pelaksanaan kegiatan *community outreach* yang

diimplementasikan dan kali pertama dilakukannya *female patrol* dalam kerangka “*Female Assessment/Analysis and Support Team (FAST)*”. Hal ini merefleksikan komitmen UNIFIL terhadap perspektif gender di dalam misi yang dibuktikan dengan inisiatif pembentukan tim khusus pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari *female peacekeepers* tidak bisa diabaikan begitu saja.

KESIMPULAN

Perang yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006 telah mengakibatkan banyak korban sehingga menimbulkan trauma bagi masyarakat sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Operasi perdamaian semakin diperluas perannya termasuk bidang kemanusiaan dan dibutuhkan peran perempuan untuk menyempurnakan tugasnya kepada masyarakat di negara konflik dan melaksanakan perdamaian yang berkelanjutan. Penulisan ini telah menunjukkan bahwa kehadiran *female peacekeepers* Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Lebanon merupakan sebuah bukti kontribusi perempuan dalam keamanan, tidak hanya menjadi korban dalam perang melainkan juga menjadi aktor perdamaian yang melindungi sesama perempuan dan anak-anak.

Keterlibatan perempuan telah menjadi sebuah usaha bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan peran mereka dan Indonesia hingga saat ini terus meningkatkan peran dan jumlah perempuan dalam *peacekeeping operations* yang tidak hanya di bidang bantuan kemanusiaan *Civil-Military Cooperations* tetapi juga bidang-bidang lainnya.

REFERENSI

Buku :

- Ackerly, Brooke. & True, Jacqui. (2006). *Feminist Methodologies for International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Carreiras, Hellena dan Gerhard Kummel (ed.). (2008). *Women in the Military and in Armed Conflict*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Dunne, Tim dan Schimdt, Brian. (2005). *Realism: The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition)*. New York: Oxford University Press.

- Hutabarat, Leonard F., H. Abdul Mun'im Ritonga, M. Zaim A. Nasution (Tim Deplu), (2007). *Tinjauan mengenai Perkembangan Konflik Lebanon - Israel dan Peranan Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL)*. Jakarta : PT. Saba Widya Persada.
- Jackson, Robert dan Sorensen, George. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Karns, Margareth & Mingst, A Karen. (2004). *International Organization: The Politics and Process of Global Governance*. Lynner Rienner Publisher.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Khoirunnisa. (2020). *Kajian Strategi Keamanan: Teori, Konsep, dan Penerapannya*. Sumbar: LPP Balai Insan Cendekia.
- McCormack, L. T. & Kleffner, J. K. (2006). *Yearbook of International Humanitarian Law 2006*. Den Haag: T.M.C. Asser Press.
- PMPP TNI. (2011). *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Jakarta: PMPP-TNI.
- Thakur, R. & Schnabel, A. (2001). *United Nations Peacekeeping Operations; Ad Hoc Missions, Permanent Engagements*. USA: United Nations Press.
- United Nations (2003). *Handbook on United Nations: Multidimensional Peacekeeping Operations*. New York: United Nations.
- United Nations (2008). *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*. New York: United Nations.

Jurnal :

- Cohen, J. dan Uphoff N. (1980). "*Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*". World Development.
- Galtung, J. (1976). *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding*. In: Galtung, J. *Peace, War and Defence: Essay in Peace Research*. Copenhagen: Ejlers.
- Ghimire, Bishwambhar. Maret (2017). "*Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions*". International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol. 7, No. 3. USA: Center for Promoting Ideas.
- Goulding, Marack. (1993). "*The Evolution of United Nations Peacekeeping*". International Affairs. Vol. 69. No. 3.
- Hutabarat, Leonard F. (2014). "*Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities*". Global & Strategis. Tahun 8. No. 2. Juli-Desember 2014.
- Hutabarat, Leonard F. (2016). "*Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*". Jurnal Pertahanan. Vol. 6. No. 2. Agustus.
- Indrawati. (2016) "*Peran Sektor Bisnis Dalam Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement On Forest Law Enforcement Governance And Trade (Vpa-Flegt) antara Indonesia dan Uni Eropa*". Global Insight Journal. Vol.1. No. 1. April-September 2016

Internet :

- “Landmark resolution on Women, Peace and Security”,
<http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>, [Diakses pada 22 Juli 2020].
- Detik News. “Dubes Achmad Chozin: Indonesia Tak akan Lupa pada Lebanon” –
<https://news.detik.com/berita/d-4351537/dubes-achmad-chozin-indonesia-tak-akan-lupapada-lebanon> - [Diakses pada 15 April 2020]
- Ivanovic, Alexandra. ”Why the United Nations Needs More Female Peacekeepers”, dalam <http://unu.edu/publications/articles/why-un-needs-more-female-peacekeepers.html>, [Diakses pada 22 Juli 2020]
- Jakarta Greater. “Kontingen Garuda Indonesia Terbesar di Unifil Lebanon” –
<https://jakartagreater.com/kontingen-garuda-indonesia-terbesardi-unifil-lebanon/> - [Diakses pada 15 April 2020]
- KBBI, 2016 - <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> [Diakses pada 15 April 2020]
- Peacekeeping.un.org. “What is Peacekeeping ?” -
<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml> -
[Diakses pada 22 Maret 2020]
- Peacekeeping.un.org. “What we operate ?” -
<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml> -
[Diakses pada 22 Maret 2020]
- TNI AU, “Wanita Pemelihara Perdamaian (*Women Peacekeepers*)” - <https://tni-au.mil.id/wanita-pemelihara-perdamaian-women-peacekeepers/> diakses pada 14 Juli 2020 pukul 22.32 WIB
- UN Peacekeeping. “Gender Statistics” -
<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml> -
[Diakses pada 22 Maret 2020]